

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

Nuraini Nuraini

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Terbuka

ARTICLE INFO

Article history:

Received November, 2025

Revised Desember, 2025

Accepted Desember, 2025

Available Desember, 2025

045136059@ecampus.ut.ac.id

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu
Bangsa Institute

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan melalui bantuan sosial oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah. Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang melibatkan aspek ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan, sehingga diperlukan intervensi kebijakan yang tepat dan efektif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan literature review, yang melibatkan pengumpulan data dari dokumen resmi, penelitian terdahulu, artikel, dan jurnal. Analisis dilakukan secara deskriptif untuk mengidentifikasi mekanisme, kendala, dan dampak pelaksanaan kebijakan bantuan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Mempawah telah melaksanakan berbagai program bantuan sosial, Program Keluarga Harapan, paket sembako, serta program pendampingan untuk meningkatkan kemandirian sosial dan ekonomi masyarakat. Penyaluran bantuan sosial terbukti berkontribusi signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan, meskipun masih terdapat kendala dalam pendataan dan distribusi bantuan yang

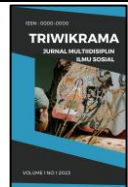
merata. Penelitian ini menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor, keterlibatan masyarakat, dan evaluasi berkelanjutan untuk mengoptimalkan efektivitas kebijakan pengentasan kemiskinan.

Kata kunci: Bantuan Sosial, Kebijakan Publik, Pemerintah Daerah, Pengentasan Kemiskinan

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of poverty alleviation policies through social assistance by the Mempawah Regency Government. Poverty is a complex problem involving economic, social, educational, and health aspects, requiring appropriate and effective policy interventions. This study employed a qualitative method with a literature review approach, involving data collection from official documents, previous research, articles, and journals. The analysis was conducted descriptively to identify the mechanisms, constraints, and impacts of social assistance policy implementation. The results show that the Mempawah Regency Government has implemented various social assistance programs, including the Family Hope Program (PKH), basic food packages, and mentoring programs to increase community social and economic independence. The distribution of social assistance has been shown to contribute significantly to poverty reduction, although challenges remain in data collection and equitable distribution of assistance. This study emphasizes the importance of cross-sectoral coordination, community involvement, and ongoing evaluation to optimize the effectiveness of poverty alleviation policies.

Keywords: Social Assistance, Public Policy, Regional Government, Poverty Alleviation



1. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan permasalahan dengan kompleksitas yang cukup tinggi serta merupakan permasalahan universal yang dialami oleh banyak negara termasuk Indonesia. Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan aspek finansial namun juga berhubungan dengan berbagai faktor lain yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan pendidikan yang layak serta kesempatan ekonomi yang berkeadilan. Faktor kemiskinan yang terjadi di Indonesia meliputi banyak aspek yang berkaitan dengan tidak meratanya akses sumber daya, ketimpangan pendapatan yang dialami oleh masyarakat dan akses layanan publik yang tidak maksimal.

Selain itu terdapat pula faktor-faktor seperti kesenjangan sosial yang seringkali terjadi di berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Selain daripada faktor-faktor yang disebutkan di atas, terdapat pula faktor permasalahan yang menjadi alasan terjadinya kemiskinan yakni tidak stabilnya ekonomi terjadinya konflik secara sosial dan angka pengangguran yang tinggi serta rentan terjadinya bencana alam.

Menurut data yang dipaparkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) hingga pada tahun 2023 garis kemiskinan rata-rata ditetapkan sebesar Rp. 550.458 setiap bulannya dari tiap individu. Sementara itu, garis kemiskinan rumah tangga miskin sebesar Rp. 2.592.657 setiap bulannya. Hingga Maret 2023, data Badan Pusat Statistik mengungkapkan bahwa di Indonesia memiliki setidaknya 25,9 juta orang yang masuk dalam kategori kemiskinan. Data tersebut mengalami penurunan sebesar 460.000 orang dibandingkan pada periode bulan September Tahun 2022 dengan penurunan 260.000 orang dibandingkan pada bulan Maret tahun 2021 (Saragih, 2024)

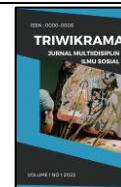
Secara sosiologis masalah kemiskinan sangat berkaitan erat dengan aspek-aspek yang meliputi relasi individu dan keluarga, masyarakat, pemerintahan, jejaring sosial, birokrasi, sistem sosial dan budaya, sumber daya alam, lingkungan nasional hingga hubungan internasional. Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan pendapatan individu dan keluarga serta masyarakat sehingga taraf hidupnya dapat mengalami perbaikan dan mencapai kesejahteraan Sosial. Masyarakat yang sejahtera dihubungkan dengan terpenuhinya kebutuhan primer dan sekunder peningkatan status sosial dan hubungan yang lebih intens serta meningkatkan harkat dan martabat manusia (Anas et al., 2024)

Salah satu hal yang paling penting dalam proses pengentasan kemiskinan di Indonesia ialah kebijakan pemerintah yang dirancang untuk terus mengurangi angka kemiskinan di masyarakat. Implementasi program yang dibuat oleh pemerintah perlu melalui tahapan pemahaman untuk mencapai terlaksananya tujuan dibentuknya sebuah kebijakan sehingga dapat dipahami oleh perencana dan juga mengambil keputusan.

Dalam setiap kebijakan yang dirumuskan akan selalu berkaitan dengan implementasi yang tidak hanya menjadi mekanisme penjabaran keputusan politik saja. Namun, berkaitan dengan rangkaian aktivitas untuk menerapkan kebijakan tersebut kepada masyarakat. Implementasi kebijakan program yang dilaksanakan oleh pemerintah seringkali tidak berjalan dengan mulus karena terdapat berbagai hambatan dan permasalahan yang cukup beragam untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Hal ini membuat angka kemiskinan cukup sulit di atasi secara maksimal. Pengentasan kemiskinan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah secara nasional saja namun juga hingga pada pemerintah daerah dan provinsi yang dirancang melalui peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan (Rogahang et al., 2023)

Dalam menghadapi pengentasan di kabupaten mempawah, pemerintah daerah mengacu pada program dan kebijakan yang telah terdapat dalam aturan perundang-undangan seperti:

1. Pada alinea ke-4 pembukaan UUD 1945 dengan penekanan diperlukan keterlibatan pemerintah untuk memajukan kesejahteraan umum



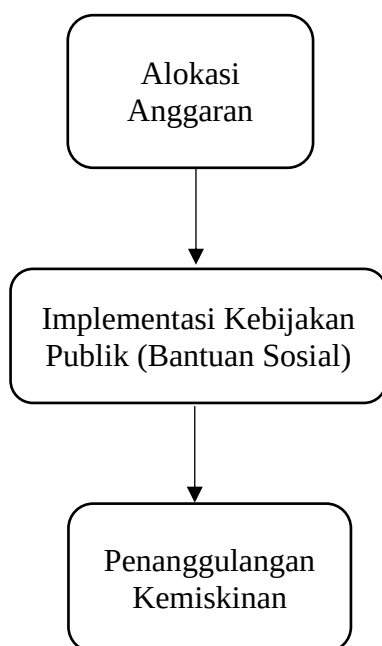
2. Undang-undang nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin yang tertuang dalam lembaran negara Republik Indonesia pada tahun 2011 nomor 83 tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5235
3. Pasal 34 undang-undang dasar 1945 dengan mengamanatkan bagi negara untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan terdapat banyak faktor kebijakan yang perlu menjadi pertimbangan sebelum dilaksanakannya implementasi kebijakan yakni berkaitan dengan konsep, pendekatan strategi, rumusan, teknik, taktik dan pelaksana serta keberpihakan pemerintah kepada masyarakat. Ketika salah satu dari faktor-faktor yang ada terabaikan, maka peningkatan kemiskinan justru akan semakin terjadi dan akan cenderung berimplikasi terhadap terjadinya penurunan kesejahteraan masyarakat. Sehingga, melalui hal tersebut faktor kebijakan yang ada perlu dimaksimalkan dan harus memiliki ketepatan sehingga kebijakan dapat terlaksana secara efektif (Masawoi et al., 2024)

Setiap aspek yang berada di dalam suatu daerah sangat perlu dimaksimalkan untuk membantu mengatasi angka kemiskinan yang ada di Indonesia secara khusus di level daerah. Pemerintah kabupaten perlu memaksimalkan berbagai kebijakan dan anggaran untuk mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi di daerah. Hal ini berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat yang menjadi ukuran kemajuan daerah. Salah satunya dapat dilaksanakan dengan pemanfaatan dana desa untuk membantu pemerintah daerah sebagai daerah otonom yang berkewenangan untuk melaksanakan pengelolaan kemampuan penyelenggaraan dan pembangunan pemerintah. Sehingga lewat pembagian kewenangan yang diberikan, pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas hidup manusia serta menanggulangi kemiskinan yang dimulai dari setiap desa (Rozandi & Digdowiseiso, 2021)

Melalui permasalahan yang terjadi di atas, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Mempawah melalui bantuan sosial.

Kerangka Pemikiran



Sumber : Peneliti



2. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan *literature review*. Penelitian kualitatif adalah sebuah metode penelitian yang berfokus pada pengamatan fenomena atau gejala yang terjadi secara alami (Abdussamad, 2021). Penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data yang dilakukan melalui tinjauan-tinjauan dan *literature review*. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif dimulai dengan reduksi data untuk menyeleksi informasi yang relevan dengan fokus penelitian (Ramdhani et al., 2014). Hasil tinjauan literatur melibatkan 3 sumber yakni, buku, penelitian terdahulu, artikel, serta jurnal. Penyajian data dalam bentuk tabel, dan grafik, serta analisis situasi masyarakat Kabupaten Mempawah, termasuk kondisi sosial-ekonomi, tingkat pengangguran, dan distribusi bantuan sosial. Selanjutnya hasil dianalisis dengan membandingkan temuan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, sehingga dapat diidentifikasi konsistensi, perbedaan, dan faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat menyimpulkan mekanisme, kendala, dan dampak kebijakan pemerintah daerah terhadap pengentasan kemiskinan. Kemudian hasil yang didapatkan penulis kemudian dideskripsikan pada hasil dan pembahasan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

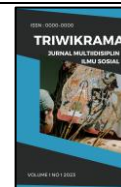
Kebijakan Publik

Menurut Nugroho (2021) proses kebijakan publik berkenaan dengan 5 tahapan berupa *planning*, *formulating*, *implementing*, *leading*, dan *controlling*. *Planning* merupakan tahap dimana sebuah kebijakan direncanakan untuk dibuat melalui penyusunan rencana berupa mengenali isu kebijakan untuk dijadikan sebuah agenda, membuat perencanaan. Selanjutnya disiapkan metode untuk membuat kebijakan dan memilih serta menetapkan tim perumus menyiapkan keperluan yang dibutuhkan untuk membuat kebijakan tersebut termasuk berkaitan dengan standar operasional yang akan ditetapkan. Selanjutnya, tahap *formulating* merupakan tahapan perumusan kebijakan dan penetapannya. Perumusan kebijakan dilaksanakan dengan menganalisis sensitifitas, mengelola risiko dan menyiapkan langkah-langkah pelaksanaan, pimpinan serta pengendalian kebijakan.

Implementing merupakan tahapan pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan lewat organisasi yang ada sehingga akan melibatkan langkah-langkah seperti menyiapkan sumber daya pelaksanaan serta prosedur yang akan digunakan dalam pelaksanaan kebijakan. Selanjutnya tahap *leading* yang merupakan urusan kepemimpinan dalam pelaksanaan kebijakan dengan persiapan tupoksi bagi pemimpin di setiap jenjang dan menyiapkan teknik pergerakan dalam pelaksanaan kebijakan. Tahapan terakhir ialah tahap *controlling* di mana pengendalian kebijakan perlu dilakukan agar tidak terlaksana dengan liar. Kegiatan tersebut mencakup pemantauan evaluasi dan pengendalian.

Dalam buku Suaib et.al (2022) dijelaskan bahwa pemerintah merupakan alat perpanjangan negara untuk melayani kebutuhan publik yang akan diperhadapkan dengan bermacam jenis maupun jumlah masalah yang memiliki tingkat kebijakan yang berbeda. Setiap kebijakan perlu ditinjau sehingga kebijakan tidak mengarah pada penyelewengan sasaran awal dibentuknya. Sehingga, pembentukan kebijakan publik pemerintah tidak dapat berfokus pada satu jenis atau variasi karena terdapatnya perubahan zaman yang cukup cepat.

Pramono (2022) menyatakan bahwa implementasi merupakan sebuah proses pelaksanaan yang berkaitan dengan suatu kebijaksanaan yang ditetapkan untuk mencapai suatu tujuan oleh suatu lembaga atau badan tertentu. Prinsipnya, implementasi kebijakan merupakan cara sebuah kebijakan untuk dapat mencapai tujuan dengan tidak kurang ataupun tidak lebih. Kebijakan publik



berupa undang-undang atau aturan daerah merupakan jenis kebijakan yang sangat memerlukan kejelasan dan merupakan kebijakan yang seringkali disebut sebagai perintah eksekutif.

Menurut Supriyanto et.al (2023) terdapat dua pendekatan dalam proses pengambilan keputusan yang pertama ialah pendekatan otoriter yang keputusan diambil sepenuhnya oleh pimpinan tertinggi yang kemudian akan dijelaskan oleh manajer kepada anggota kelompok. Sedangkan pada pendekatan group akan lebih menghasilkan keputusan baik karena keputusan dilakukan secara bersama-sama lewat pelaksanaan analisis masalah untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan pelibatan kelompok.

Implementasi Bantuan Sosial di Mempawah

Kabupaten Mempawah menghadapi berbagai tantangan dalam penanggulangan kemiskinan, termasuk ketimpangan distribusi sumber daya, pengangguran, dan dampak pandemi COVID-19. Berdasarkan data BPS (2024), angka kemiskinan mengalami fluktuasi, dengan penurunan signifikan pada 2024 menjadi 4,83%. Kondisi ini menunjukkan adanya intervensi kebijakan yang efektif melalui bantuan sosial dan program pendukung lainnya.

Izudin (2022) menyatakan bahwa pembangunan sosial tidak dapat terlepas dari aspek pelayanan sosial yang menjadi tujuan sebuah bangsa untuk pemberian keadilan sosial komarasa aman dan kemakmuran bagi masyarakatnya. Pembangunan sosial berkaitan dengan aspek-aspek seperti kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, sumber pendapatan dan indikator lain yang berkontribusi dalam kehidupan masyarakat. Program pelayanan sosial mengacu pada konsep pemetaan perkembangan pembangunan yang ada di suatu negara.

Pelaksanaan pengentasan kemiskinan melalui kebijakan dan program-program pengurangan angka kemiskinan yang telah diimplementasikan oleh pemerintah kabupaten Mempawah berpedoman pada dasar hukum dan kebijakan yang telah dibuat secara nasional maupun kebijakan daerah provinsi Kalimantan Barat. Angka kemiskinan di kabupaten Mempawah memerlukan langkah yang optimal dan efektif sehingga terjadi sinergitas yang berkelanjutan sejalan dengan RPJMD kabupaten Mempawah.

Keseriusan pemerintah kabupaten Mempawah untuk melakukan penanggulangan kemiskinan melalui pelaksanaan peraturan daerah maupun nasional mengenai pengentasan kemiskinan daerah. Rancangan kebijakan pembangunan daerah melalui pengentasan kemiskinan selama periode 5 tahun dilaksanakan melalui tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah yang menjadi sebuah wadah kerjasama lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk mempercepat kinerja penanggulangan kemiskinan.

Pemerintah kabupaten Mempawah terus melakukan pendampingan bagi masyarakat yang masuk dalam taraf kemiskinan untuk mendapat menjadi masyarakat yang mandiri. Pendampingan tersebut tidak hanya lewat bantuan sosial namun juga diterapkan program prioritas melalui pilar-pilar yang berkaitan dengan program keluarga harapan, tenaga kesejahteraan Sosial tingkat desa, karang taruna lembaga kesejahteraan Sosial anak dan juga lembaga lain yang dilibatkan untuk membantu menekan angka kemiskinan.

Kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah memiliki tahapan-tahapan sebelum dilakukan implementasi, tahapan tersebut berupa:

1. Penyusunan agenda, sebelum memasuki agenda kebijakan setiap permasalahan yang ada di masyarakat akan dibagi menjadi prioritas prioritas hingga pada akhirnya masalah tersebut akan dimasukkan dalam agenda perumus kebijakan.
2. Formulasi kebijakan, pelaksanaan tahapan ini didasarkan pada permasalahan yang ada kemudian dilakukan di proses diskusi oleh pencipta kebijakan yang kemudian akan dilakukan

pengertian mengenai permasalahan yang ada dan memecahkan masalah tersebut melalui alternatif yang ada untuk memecahkan permasalahan.

3. Implementasi kebijakan yang merupakan tahapan untuk menerapkan setiap kebijakan yang telah dirumuskan pada masyarakat dengan tujuan untuk menjawab permasalahan yang terjadi.
4. Setelah strategi yang ada diimplementasikan kemudian diperlukan adanya evaluasi dan penyesuaian terus-menerus berkaitan dengan kebijakan bantuan sosial yang telah dilakukan sehingga ketika terjadi sebuah permasalahan kembali akan dilakukan alternatif lain untuk mengoptimalkan kebijakan yang telah dirumuskan.

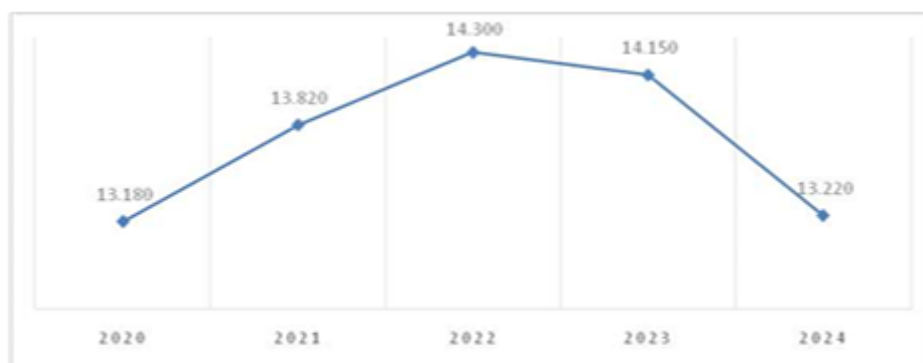
Tabel 1
Pesentase Angka Kemiskinan di Kabupaten Mempawah
Tahun 2020-2024

No	Tahun	Jumlah	Persentase
1.	2020	13.180	4,95
2.	2021	13.820	5,18
3.	2022	14.300	5,32
4.	2023	14.150	5,21
5.	2024	13.220	4,83

Sumber: BPS, 2024

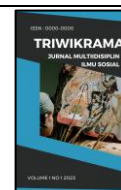
Berdasarkan pada table 1 di atas, pada tahun 2020, jumlah persentase masyarakat miskin di kabupaten Mempawah berada di angka 4,95%, angka ini mengalami kenaikan cukup signifikan di tahun 2021 dengan kenaikan angka menjadi 5,18%, kenaikan ini disebabkan oleh adanya pandemi yang terjadi sehingga terdapat peningkatan persentase kemiskinan yang terjadi pada masyarakat di kabupaten Mempawah. Pada Tahun 2022 terdapat pula peningkatan angka kemungkinan pada angka 5,32% dan di tahun 2024 terdapat penurunan yang cukup signifikan terhadap angka kemiskinan di kabupaten Mempawah di angka 4,83%.

Gambar 1
Grafik Angka Kemiskinan di Kabupaten Mempawah
Tahun 2020-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik (bps.go.id) Tahun 2024

Berdasarkan gambar 1 di atas, dapat terlihat bahwa angka kemiskinan yang terjadi di tahun 2020 di kabupaten Mempawah berkisar pada 13.180 jiwa dan mengalami kenaikan di tahun 2021



akibat terjadinya pandemi sehingga angka kemiskinan berada pada angka 13.820 dan mengalami kenaikan kembali di Tahun 2022 sebesar 14.300 jiwa. Dan pada tahun 2023 terdapat penurunan sebesar 14.150 jiwa kemudian terjadi penurunan secara signifikan pada tahun 2024 dengan jumlah angka kemiskinan sebanyak 13.220 jiwa. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka di kabupaten Mempawah pada tahun 2024 berada pada persentase 4,86%, yang mengalami penurunan dibanding tahun 2023 yang berada pada persentase 5,05%.

Penurunan angka kemiskinan yang terjadi di kabupaten Mempawah tidak serta-merta terjadi karena peningkatan ekonomi masyarakat namun berkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah terutama melalui bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat miskin di kabupaten Mempawah. Pemerintah kabupaten Mempawah mengalokasikan bantuan sosial sebesar Rp. 6.632.100.000 untuk anggaran belanja bantuan sosial pada tahun 2024.

Dana tersebut direalisasikan sebesar Rp. 6.605.195.240 dengan persentase sebesar 99,59% realisasi dana anggaran belanja bantuan sosial yang telah dianggarkan oleh pemerintah kabupaten Mempawah. Dana ini mengalami peningkatan cukup signifikan dibandingkan anggaran belanja daerah untuk bantuan sosial yang disalurkan pada tahun 2023 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.861.404.000.

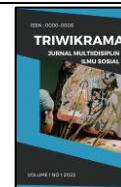
Pemerintah Daerah kabupaten Mempawah memiliki bidang urusan sosial yang meliputi lima program yakni:

1. Program rehabilitasi sosial yang meliputi anak terlantar, penyandang disabilitas terlantar, dangdut usia terlantar serta gelandangan pengemis yang berada di luar panti sosial dengan sub aktivitas berupa:
 - a) Penyediaan makanan
 - b) Sandang
 - c) Alat bantu,
 - d) Pemberian bimbingan mental, fisik spiritual dan sosial, dan
 - e) Pemberian layanan data dan pengaduan.
2. Perlindungan dan jaminan sosial yang mencakup pemeliharaan anak-anak terlantar dengan sub kegiatan berupa menjangkau anak-anak terlantar.
3. Program penanganan bencana yang berkaitan dengan perlindungan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada korban bencana alam dan sosial di kabupaten Mempawah dengan penyediaan kegiatan berupa makanan, dan sandang.

Bantuan sosial yang seringkali diberikan oleh pemerintah kabupaten Mempawah dalam rangka untuk mengendalikan inflasi yang terjadi dengan pemberian bantuan sosial berupa paket sembako untuk 806 penerima yang berasal dari keluarga miskin di kecamatan sungai pinyuh melalui bupati kabupaten Mempawah. Bantuan sosial diberikan kepada desa-desa yang terdapat di kabupaten Mempawah dengan penerima yang berasal dari Desa Sungai Bakau Besar yang disalurkan kepada 172 penerima.

Desa Sungai Bakau Besar Laut menerima 209 paket sembako, Desa Sungai Batang dengan 88 penerima yang berasal dari masyarakat miskin dan Desa Nusapati sebanyak 293 penerima serta yang terakhir Kelurahan Sungai Pinyuh sebanyak 806 penerima. Bantuan sosial tersebut diberikan untuk mengendalikan inflasi dengan anggaran yang diperoleh melalui dana alokasi umum pada tahun anggaran 2024.

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan kebijakan SPM masih terdapat beberapa indikator yang belum terpenuhi faktor-faktor yang menyebabkan hal tersebut ialah yang pertama permasalahan yang berkaitan dengan minimnya pemahaman kebijakan SPM oleh aparaturnya sehingga



timbul bahwa kebijakan tersebut merupakan kebijakan prioritas dan yang kedua ialah pemahaman yang tidak benar tersebut membuat kebijakan SPM yang telah masuk dalam rencana strategis namun penyusunan kegiatan tidak masuk dalam rencana kegiatan sehingga tidak memperoleh alokasi anggaran yang memadai. Ketiga kebijakan SPM sebagai belum dijadikan unsur penilaian kinerja pemerintah daerah.

Tantangan kebijakan sosial dalam pemenuhan pelayanan sosial tidak dapat dilepaskan dari adanya pengaruh pasar bebas dan globalisasi yang memiliki kehendak berupa minimalisasi peran negara di mana terdapat hal-hal yang berkaitan dengan perolehan keuntungan secara besar tanpa memperhatikan aspek kesejahteraan Sosial sehingga program kebijakan bantuan sosial menjadi upaya negara untuk menciptakan perasaan aman bagi penduduk lewat sistem sosial.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis sejalan dengan penelitian lain yang telah dilakukan sebelumnya Dimana bantuan sosial menjadi sebuah program yang bertransformasi yang tidak dapat dilepaskan dari narasi pembangunan ekonomi di suatu daerah. Melalui adanya bentuk sosial yang diberikan kepada masyarakat, maka akan dapat terjadi pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehingga pendapatan perkapita yang diperoleh masyarakat di taraf kemiskinan dapat dialokasikan kepada hal lain sehingga akan menekan kesejahteraan setiap keluarga yang membawa taraf kemiskinan.

Namun dalam penelitian ini penulis menemukan bahwa program bantuan sosial yang diterapkan oleh pemerintah kabupaten Mempawah terdapat pelibatan stakeholder yang memungkinkan terjadinya percepatan realisasi program bantuan pada Masyarakat lewat berbagai program sosial. Selain itu, keterlibatan Masyarakat juga menjadi hal yang mendorong terjadinya percepatan Pembangunan daerah Kabupaten Mempawah.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, kebijakan pemerintah kabupaten Mempawah dalam mengalokasikan anggaran bantuan sosial kepada masyarakat kabupaten Mempawah yang berada dalam taraf kemiskinan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan di kabupaten Mempawah. Pemberian bantuan sosial yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Mempawah tidak hanya berkaitan dengan penyediaan sembako namun juga melalui berbagai program seperti program keluarga harapan dan program-program lain terutama difokuskan pula pada pelatihan-pelatihan pada setiap masyarakat sehingga dapat mencapai kemandirian sosial dan ekonomi.

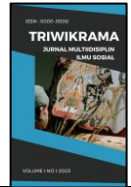
Saran

Penyaluran bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah daerah merupakan program yang efektif untuk mengatasi kemiskinan di kabupaten Mempawah namun dalam pelaksanaannya masih terdapat banyak masyarakat yang belum memperoleh bantuan sosial secara merata. Hal ini dikarenakan pendataan yang dilakukan masih kurang maksimal sehingga memerlukan adanya pendataan yang tepat sasaran sehingga dapat membantu masyarakat miskin dengan lebih efektif.

5. DAFTAR PUSTAKA

Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian KUALITATIF*. Makassar: Syakir Media Press.

Anas, F., Zulkhah, S., & Sholikin, A. (2024). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Lamongan. *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 16(02), 249-259. <https://doi.org/https://doi.org/10.52166/madani.v16i02.7402>



- Badan Pusat Statistik Kabupaten Mempawah. (2024). *Persentase penduduk miskin*. Diakses dari <https://mempawahkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzkjMg==/persentase-penduduk-miskin.html>
- Izudin, A. (2022). *Analisis Perencanaan Kebijakan dan Pelayanan Sosial*. Prenada Media. Komputindo.
- Masawoi, F., Laurens, S., & Madubun, J. (2024). Evaluasi Implementasi Kebijakan Penyaluran Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kota Ambon. *Innovative: Journal Of Social ...*, 4(4), 7079-7089.
- Nugroho, R. (2021). *Kebijakan publik: implementasi dan pengendalian kebijakan*. Elex Media
- Pemerintah Kabupaten Mempawah. (2025). *Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2024*. Pemerintah Kabupaten Mempawah. https://mempawahkab.go.id/public/unduh/bankdata/1749629171_c041a184d4981898ed1f.pdf
- Pramono, J. (2022). *Kajian Kebijakan Publik: Analisis Implementasi dan Evaluasinya di Indonesia*. Unisri Press.
- Ramdhani, A., Ramdhani, M. A., & Amin, A. S. (2014). Writing a Literature Review Research Paper: A Step-bystep Approach. *International Journal of Basics and Applied Sciences*, 3(1), 47-56.
- Rogahang, A. L., Tulus, F. M. G., & Palar, N. R. A. (2023). Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Desa Molompar Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Administrasi Publik*, IX(4), 403-419.
- Rozandi, M., & Digdowiseiso, K. (2021). Implementation of Use of Village Funds on Development (Case Study of Sengkubang Village, Mempahilir District, West Kalimantan, Indonesia). *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 6(1), 2549-7685.
- Saragih, J. (2024). Evaluasi Efektivitas Kebijakan Bantuan Sosial Pemerintah dalam Mengatasi Kemiskinan. *CAKRAWALA - Repositori IMWI | Volume 7, Nomor 3, Mei-Juni 2024 p-ISSN: 2620-8490; e-ISSN: 2620-8814*, 4(1), 9-15.
- Suaib, H., Rakia, A. S. R., Purnomo, A., & Ohorella, H. M. (2022). *Pengantar kebijakan publik*. Humanities Genius.
- Supriyanto, A., Hadiono, K., Purwatiningtyas, S. E., & Razaq, J. A. (2023). *Buku ajar sistem pendukung keputusan: Konsep dan contoh aplikasi keputusan pemberian bantuan sosial*. Deepublish.